
Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Budaya Kontrol dalam Sistem Pendidikan

Imelda

Universitas Hasanuddin

E-mail: april_27meil@yahoo.com

Article History:

Received: 07 November 2022

Revised: 19 November 2022

Accepted: 20 November 2022

Keywords: Budaya Organisasi, Pelayanan Pendidikan, Kualitas Pelayanan

Abstract: Budaya organisasi menjelaskan tentang bagaimana memandang bagian lain dan bagaimana setiap bagian berperilaku sebagai hasil dari pandangan tersebut, sehingga budaya organisasi bersifat berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, termasuk lembaga pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan di sekolah adalah sejauh mana sekolah dapat menunjukkan ketersediaan, kelengkapan, kelayakan sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, reliabilitas tenaga pendidik, responsivitas tenaga pendidikan dalam melaksanakan pelayanan, kepastian dalam pelayanan, dan sikap empati dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Pelayanan pendidikan dengan manajemen pola baru sejatinya senantiasa memiliki harapan prestasi siswa baik akademik maupun non akademik (olahraga, seni, kepramukaan, keagamaan) dan prestasi sekolah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Sekolah harus lebih awal untuk memikirkan penerapan ISO (International Standar Organizations) sebagai antisipasi menghadapi tantangan global bidang pendidikan masa yang akan datang. Harapan masyarakat dari sekolah diantaranya adalah mutu pendidikan yang baik sebagai hasil pelayanan yang baik, ditandai dengan minimal tiga aspek jaminan mutu pendidikan yaitu, kompetensi, akreditasi, dan akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Lembaga yang memiliki budaya organisasi yang mantap akan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai situasi, baik yang datang dari pihak internal maupun eksternal. Budaya organisasi yang baik merupakan proses pembelajaran terus menerus dalam organisasi. Nilai-nilai positif dari budaya kerja terus dibina dan diwariskan kepada seluruh anggota baru organisasi agar tetap berakar kuat dalam organisasi. Anggota harus mampu menyesuaikan diri dan menerima positif dengan norma-norma atau nilai-nilai yang dibangun dan yang berlaku dalam organisasi dan tidak menutup diri terhadap perubahan lingkungan. Fenomena inilah yang sedang dibangun di lembaga pendidikan. Sekolah harus memperbaiki kinerja, melalui perbaikan kinerja seluruh personal sekolah, sehingga sekolah memiliki personal berkemampuan tinggi. Seluruh personal

sekolah harus memikirkan cara-cara yang benar dalam berkarya atau bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan harapan mereka masing-masing dan sesuai pula dengan tujuan sekolah. Dengan kualitas kinerja yang tinggi diharapkan dapat memberi sumbangan yang sangat berarti bagi kinerja dan kemajuan sekolah khususnya mutu pendidikan.

Budaya organisasi lembaga pendidikan akan menjadi mantap manakala seorang pemimpin memiliki andil yang cukup besar dalam penciptaan budaya organisasi tersebut. Sikap dan perilaku pimpinan, baik dalam ucapan maupun tingkah laku menjadi contoh bagi para anggota dalam melaksanakan aktivitasnya. Perilaku pemimpin yang rajin dalam bekerja dapat menjadi pendorong bagi bawahannya. Keputusan yang telah diambil terhadap suatu kondisi tertentu dilaksanakan secara teguh menunjukkan suatu sikap positif dari seorang pimpinan. Pemimpin yang demikian akan memiliki pengaruh besar terhadap budaya organisasi dan cenderung tidak memiliki kendala karena kebiasaan atau ideologi yang dijalankan.

Layanan pendidikan di sekolah sebagai layanan publik dinyatakan dalam pasal 5 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang selengkapya berbunyi: ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumberdaya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Tuntutan masyarakat adalah layanan yang berkualitas atau layanan yang bermutu. Salah satu yang diharapkan diterima oleh masyarakat dari sekolah adalah mutu pendidikan yang baik sebagai bukti hasil pelayanan.

Makalah ini dimaksudkan untuk membahas budaya kontrol dalam sistem pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah dan sejauh mana sekolah dapat menunjukkan ketersediaan, kelengkapan, kelayakan sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, reliabilitas tenaga pendidik, responsivitas tenaga pendidikan dalam melaksanakan pelayanan, kepastian dalam pelayanan, dan sikap empati dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Pelayanan pendidikan dengan manajemen pola baru sejatinya senantiasa memiliki harapan prestasi siswa baik akademik maupun non akademik (olahraga, seni, kepramukaan, keagamaan) dan prestasi sekolah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah kebiasaan, tradisi, dan cara umum dalam melakukan segala sesuatu yang ada di sebuah organisasi, sebagai hasil atau akibat dari yang telah dilakukan sebelumnya. Budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi menjelaskan tentang bagaimana memandang bagian lain dan bagaimana setiap bagian berperilaku sebagai hasil dari pandangan tersebut, sehingga budaya organisasi bersifat berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, termasuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan satu dengan lembaga pendidikan lainnya memiliki budaya yang berbeda dan mengalami perkembangan. Budaya organisasi tidak selalu tetap, bahkan perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan agar organisasi tetap hidup, mengembangkan budaya berprestasi, mengubah pola pikir dan memelihara kepercayaan dalam organisasi.

Adopsi budaya yang kuat dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan cara secara umum semua riset mengklaim hal ini memfasilitasi konsistensi perilaku internal. Budaya organisasi adalah sistem yang mengarahkan perilaku individu agar searah dengan tujuan

organisasi. Dalam hal mengubah budaya maka pimpinan harus mampu mengubah dirinya terlebih dahulu. Pimpinan organisasi harus mau menerima tanggung jawab dalam rangka perubahan budaya. Perubahan budaya tidak mungkin dilakukan dalam sekejap waktu tetapi secara bertahap dan memerlukan waktu. Pemimpin jangan membuat suatu kesalahan dalam tahapan pelaksanaan program budaya kerja, karena bila hal tersebut terjadi maka dapat melemahkan semangat dan menurunkan kepercayaan bawahan terhadap pimpinan. Anggota harus mampu menyesuaikan diri dan menerima dengan positif norma-norma atau nilai-nilai yang dibangun dan yang berlaku dalam organisasi dan tidak menutup diri terhadap perubahan lingkungan. Fenomena inilah yang sedang dibangun di lembaga pendidikan.

Pengaruh lingkungan dalam Budaya Organisasi dan mengenai perubahan cara pengelolaan organisasi tersebut tentu saja menuntut perubahan mendasar dalam pola pikir dari seluruh anggota organisasi. Termasuk didalamnya perubahan yang memfokuskan pada ketrampilan, pengetahuan, dan perilaku. Pengelolaan organisasi secara tradisional sudah tidak lagi mencukupi ketika dunia menjadi lebih kompetitif dan dinamis. Jadi, untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara konstan, organisasi juga harus melakukan perubahan organisasi agar tetap survive. Perubahan tersebut bias berada dalam kontinum perubahan kecil samapi dengan transformasi organisasi. Landasan dasar dari perubahan adalah budaya untuk mau dan mampu beradaptasi.

2. Membangun Budaya Organisasi Di Sekolah Untuk Pengembangan Lembaga

Sekolah merupakan salah satu organisasi pendidikan yang dapat dikatakan sebagai wadah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan tujuan pendidikan di sekolah tergantung pada sumber daya manusia, yaitu Kepala sekolah, guru, siswa, pegawai tata usaha, dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengelola organisasi sekolah tersebut. Dalam hal ini, yang terpenting adalah membudayakan organisasi di lingkungan sekolah tersebut. Selain itu harus didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Pentingnya membangun budaya organisasi di sekolah terutama berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan sekolah dan peningkatan kinerja sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh Stephen Stolp tentang School Culture yang dipublikasikan dalam ERIC Digest, dari beberapa hasil studi menunjukkan bahwa budaya organisasi di sekolah berkorelasi dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa serta kepuasan kerja dan produktivitas guru.

3. Kontrol/Pengawasan

Pendidikan senantiasa terkait dengan proses pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai manusia yang berkualitas. Pembangunan juga menyasar pembangunan ekonomi yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Bahwa untuk mengembangkan SDM membutuhkan ekonomi yang kuat pula. Dalam pembahasan ini, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dari bidang ilmu lain seperti manajemen melainkan berintegrasi.

UU RI No.2 tahun 1989 bab I Pasal 1 mendefinisikan pendidikan sebagai “usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran, dan atau latihan abagi peranannya di masa yang akan datang”. Dari defenisi ini, diperoleh empat karateristik pendidikan yaitu usaha sadar, penyiapan sebagai fungsi pendidikan, peserta didik, dan bimbingan, pengajaran atau latihan. Yang dimaksud dengan usaha sadar adalah semua penyelenggaraan pendidikan telah dirancang dengan matang, lengkap, jelas dan utuh berdasarkan pertimbangan yang rasional dan objektif serta tidak bersifat coba-coba atau tiba-

tiba. Sedangkan persiapan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan. Persiapan yang dimulai dari unsur peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang saling berpengaruh. Karakteristik peserta didik dapat ditinjau dari segi psikologis, sosial dan edukatif. Bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, terpadu dan menyeluruh dan senantiasa ditumbuhkembangkan agar memiliki kesiapan untuk hidup dalam masyarakat. Serta karakter peserta didik yang memerlukan bimbingan, latihan dan pengajaran dalam semua aspek pendidikan agar mereka dapat menyesuaikan diri dalam situasi sesuai minat, kemampuan dan kebutuhan sosialnya. Dengan kata lain, pendidikan yang diberikan kepada siswa adalah yang telah melewati berbagai proses yang ilmiah baik dari segi belajar, pengajaran, lingkungan sekolah agar mereka dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pengontrolan adalah suatu proses pengecekan *performance* terhadap standar untuk menentukan sejauh mana tujuan telah tercapai. Pada paradigma lama, pengontrolan sangat erat hubungannya dengan perencanaan sebagai bagian dari sistem manajemen merupakan fungsi terakhir dalam proses manajemen. Anggapan ini dianggap keliru karena pada dasarnya fungsi kontrol bersifat simultan dengan fungsi-fungsi yang lain dalam sistem manajemen. Keputusan kontrol dapat mempengaruhi rencana, begitu pula sebaliknya.

Kontrol dapat dikatakan pula sebagai monitoring atau pengawasan. Pada ranah manajemen, pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa para anggota telah melakukan aktivitas yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Bahwa pengawasan dilaksanakan untuk tujuan supervisi yaitu mulai dari pemberian bantuan. Dalam bidang pendidikan, ada yang namanya supervisi kurikulum yang memberikan bimbingan profesional kepada guru agar guru memiliki profesionalisme dalam pembelajaran. Supervisi kurikulum dalam hal ini adalah sebuah sistem yang meliputi komponen masukan, proses dan kelulusan yang berhubungan satu dengan yang lain.

Pengawasan atau kontrol sekolah terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 15 ayat 4 dijelaskan bahwa pengawas sekolah harus melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Sehingga dapat dimaknai bahwa pengawasan khususnya sekolah dituntut berkualifikasi dan berkompeten dalam menjalankan amant ini.

Murdick dalam Nanang Fattah mengemukakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses dasar yang secara esensial diperlukan meskipun sangat lah berat dan kompleks dalam pelaksanaannya. Proses dasar pengawasan terdiri dari dua langkah yaitu:

- a. Menetapkan standar-standar pelaksanaan pekerjaan yaitu penentuan standar mencakup kriteria untuk semua lapisan pekerjaan atau job performance dalam suatu organisasi. Kriteria-kriteria dapat dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif (ongkos, waktu, ongkos, program, pendapatan dan kriteria yang bersifat *intangible*) yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan sebagai suatu standar.
- b. Pengukuran hasil atau pelaksanaan pekerjaan
- c. Metode dan koreksinya dapat dijelaskan melalui fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan yaitu garis umpan balik, proses manajemen yang berwujud meninjau kembali rencana mengubah tujuan atau standar, pengorganisasian yaitu memeriksa struktur organisasi yang ada apakah telah memenuhi standar, apakah telah menjalankan tugas dan kewajiban dan apakah perlu penataan kembali orang-orang, selanjutnya ada pula penataan staf yaitu memperbaiki system seleksi, memperbaiki system latihan, dan menata kembali tugas-tugas, serta pengarahan yaitu mengembangkan kepemimpinan yang lebih baik,

meningkatkan motivasi, menjelaskan pekerjaan yang sukses dan kesadaran akan tujuan antara pimpinan dan anak buah dalam suatu standar yang disepakati bersama.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa proses pengawasan dimulai dari menetapkan standar kerja untuk semua pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi dan standar pelaksanaan pekerjaan tersebut secara kualitas dan kuantitas, selanjutnya adalah mengukur hasil dari pelaksanaan tersebut untuk kemudian diambil langkah-langkah untuk memperbaikinya.

Proses pengawasan dapat berhasil jika penilaian dilakukan secara terinci dan jelas dan menjadi umpan balik untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang dikendaki. Oteng Sutisna (1986) mengatakan bahwa para pengawas dan kepala sekolah tidak dapat membuat saran-saran untuk perbaikan organisasi dan program sekolah jika mereka tidak mempunyai hasil-hasil penilaian. Dengan demikian fungsi pengawasan mencakup pengendalian, penilaian dan pelaksanaan serta pengambilan tindakan penertiban yang sifatnya represif dan preventif terhadap kegiatan manajemen pendidikan. Fungsi pengawasan atau kontrol juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mencegah penyimpangan. Dalam manajemen pendidikan, pengawasan dan penilaian adalah dua sistem yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Fungsi pengawasan dan penilaian pendidikan tidak hanya memeriksa tindakan yang disesuaikan dengan peraturan tetapi menjadi motor penggerak pembaharuan pendidikan dan membina sekolah yang baik. Dengan demikian, pengawasan dilakukan untuk melihat berbagai hal tidak hanya penyimpangan yang ada di suatu organisasi dalam pendidikan tetapi juga melihat sejauh mana target telah memenuhi standar untuk kemudian di nilai dan diambil kebijakan.

Hadari Nawawi (1983) yang dikutip pada portal UPI mengatakan bahwa ada lima fungsi pengawasan yaitu:

- a. Mendapatkan data yang telah diolah yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan ke depan.
- b. Memperoleh cara bekerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
- c. Memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran yang dihadapi agar dapat dihindari atau dikurangi.
- d. Memperoleh data yang digunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan organisasi dan personil dalam berbagai bidang kerja.
- e. Mengetahui seberapa jauh tujuan telah dicapai.

Pada fungsi di atas hanya menggunakan data untuk melihat sejauh mana tujuan yang telah dicapai serta hambatan-hambatan dan kelebihan-kelebihan dalam proses pelaksanaan suatu target atau tujuan. Menurut penulis, fungsi pengawasan bekerja sama dengan penilaian bisa digunakan untuk memberikan reward atau punishment pada personil atas pekerjaannya.

4. Tipe – Tipe Pengawasan

Dalam Oemar Hamalik, dijelaskan beberapa jenis kontrol atau pengawasan yaitu kontrol budget atau anggaran yang menggambarkan rencana, tujuan, program dalam bentuk perangkaian atau perhitungan. Penyiapan anggaran termasuk dalam kategori perencanaan sedangkan administrasi adalah sebuah kontrol. Sedangkan standar anggaran dibandingkan dan disesuaikan dengan biaya operasi.

Sedangkan kontrol kurikulum dipandang sebagai proses pembuatan keputusan tentang kurikulum di dalam sekolah atau proses pengajaran yang dibatasi oleh minat-minat pihak luar seperti orang tua, karyawan, masyarakat local atau masyarakat luas. Kontrol ini memiliki manifestasi administratif formal misalnya spesifikasi kurikulum pada tingkat Negara berupa

kebijakan kurikulum yang terpusat dan jelas kebijakan kurikulum mungkin kurang berpengaruh dalam praktek pendidikan tetapi penting dalam pengaturan finansial sebagai kunci sumber-sumber kurikulum. Sehingga penetapan item-item kurikulum bukan sepenuhnya hak guru tetapi juga ada juga item yang berasal dari public kurikulum. Misalnya di China, pemerintah mengontrol kurikulum dengan cara pelajaran kewarganegaraan dan pendidikan karakter diajarkan dari SD hingga SMP. Begitu pula sistem pendidikan di Indonesia, kontrol kurikulum dapat dilihat dari adanya Kurikulum 2013 yang dibuat oleh pemerintah sebagai pedoman dalam jenjang pendidikan SD hingga SMU serta di Perguruan Tinggi dengan adanya aturan KKNI.

5. Kontrol Negara Terhadap Pendidikan

Kontrol merupakan suatu budaya yang telah menjadi ketetapan rutin dalam suatu lembaga pendidikan. Budaya kontrol telah masuk kedalam aspek evaluasi kebijakan, dimana setiap evaluasi akan menghasilkan masukan yang berupa kontrol dalam setiap kebijakan. Kontrol menurut Tilaar dan Nugroho, termasuk ke dalam teori proses, karena setiap pembentukan kebijakan agar terlaksana dengan baik, maka tahap kontrol lebih utama difokuskan ke dalam proses letak evaluasi kebijakan yang merupakan salah satu kontrol tindakannya berupa: Melakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi pengaruh, (*impact*) dan kelompok sasaran dan non-sasaran, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses yang berkenaan dengan cara-cara menyusun kegiatan sesuai yang direncanakan dan disepakati bersama. Pengawasan dalam manajemen pendidikan sangat diperlukan agar setiap pelaksanaannya tetap dalam koridor nilai-nilai falsafah pendidikan.

Pengawasan bisa bersifat *bottom-up* ataupun *top-down*. Sedangkan rentang kontrol biasanya hanya dilakukan oleh seorang manajer atau atasan dari suatu organisasi (lembaga pendidikan). Pemerintah adalah bagian dari Negara yang paling kasat mata dan dapat juga menjadi bagian paling penting dan paling aktif dari Negara, tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari Negara. Negara terdiri dari berbagai institusi yang masing masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam tatanan kehidupan kenegaraan. Tujuan utama dari kebijakan reformasi pendidikan negara adalah untuk membawa perbaikan dalam proses belajar siswa. Ini tidak dapat terjadi tanpa mempengaruhi orang-orang yang bekerja di sekolah-sekolah.

Setiap periode perbaikan dan perkembangan pendidikan adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena perkembangan tersebut menentukan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karakteristik, dan kesadaran politik yang banyak mempengaruhi masa depan bangsa tersebut. Setiap periode perkembangan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik karena pada hakikatnya pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan kekuatan – kekuatan politik yang sedang berkuasa. Pendidikan telah menjadi bagian strategis dalam kehidupan, sehingga perlu untuk dirancang, diatur dan diarahkan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Negara harusnya menaruh lebih banyak kepedulian dalam bidang pendidikan dengan menyediakan anggaran yang besar serta melakukan kontrol yang ketat dan tepat dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Pemerintah adalah bagian dari Negara yang berperan paling penting, namun demikian lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan peran dalam pendidikan dan pengawasan anggaran juga harus aktif dan mengambil banyak peran dalam pengelolaan, pengawasan anggaran tersebut.

Menurut Dale (1989: 39 - 43) dalam Gusmawan, control Negara terhadap pendidikan

umunnya dilakukan melalui empat cara. *Pertama*, system pendidikan diatur secara legal. *Kedua*, system pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas. *Ketiga*, penerapan wajib pendidikan (compulsory education). *Keempat*, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam konteks tertentu. Dale (1989:59) menambahkan bahwa perangkat Negara dalam bidang pendidikan, seperti sekolah dan administrasi pendidikan memiliki efek tersendiri terhadap pola, proses, dan praktik pendidikan.

6. Contoh Lemahnya Pengawasan Pendidikan Di Indonesia

Meskipun secara teori berbagai buku telah memuat tentang tata cara kontrol pendidikan yang baik namun tetap saja Indonesia belum terbebas dari lemahnya pengawasan dalam banyak hal terutama dalam bidang pendidikan. Berikut ini beberapa contoh lemahnya pengawasan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari contoh:

- a. Salah satu contoh pengawasan pemerintah Indonesia seperti dalam pencaanangan program integritas di tingkat sekolah, seperti disajikan dalam media *cnnindonesia online* berikut ini,

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan saat ini masih banyak sekolah yang melakukan kecurangan dan ketidakjujuran terutama saat menghadapi ujian nasional (UN). Persoalan tersebut menjadi perhatian utama Kemendikbud untuk membenahi generasi penerus bangsa yang berintegritas.

Kemendikbud mencatat hanya 503 sekolah dari lebih dari 80 ribu sekolah dan madrasah yang memiliki indeks integritas tinggi dalam pelaksanaan UN selama lima tahun berturut-turut. Jumlah itu terbilang sangat minim dan dibutuhkan kerja ekstra untuk mewujudkan sekolah sebagai tempat tumbuhnya generasi berintegritas.

"Ujian nasional sekarang dinilai dari dua aspek, yakni nilai akademik dan nilai kejujuran. 503 sekolah ini indeks integritasnya mencapai angka 92," ujar Anies di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (22/12). Anies mendatangi Gedung KPK bersama sejumlah perwakilan kepala sekolah yang dinilai telah konsisten menegakkan integritas dalam pelaksanaan ujian nasional di sekolahnya. Mereka menjadi tamu pertama yang mendatangi pimpinan KPK yang baru terpilih. Para kepala sekolah yang didampingi Anies sebelumnya telah diundang ke Istana untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mereka kini bertemu pimpinan KPK untuk berkoordinasi soal pencaanangan program integritas di tingkat sekolah.

"Ini artinya kalo didiamkan terus, maka orang yang akan mendatangi kantor (KPK) ini di masa depan tidak akan pernah selesai," kata Anies. Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresiasi program integritas yang telah diberlakukan para kepala sekolah. Dia menyatakan konsistensi melawan ketidakjujuran perlu dipegang teguh oleh semua pihak di lapisan masyarakat demi mewujudkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. "KPK tidak bisa bergerak sendiri. Kita semua harus bergerak. Kesadaran dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mampu mewujudkan Indonesia terbebas dari perilaku koruptif," kata Agus.

Dengan penegakan peraturan mengenai tingkat kecurangan dan ketidakjujuran sekolah terhadap pelaksanaan UN di sekolah, maka pemerintah melakukan kontrol terhadap kejujuran sekolah-sekolah tersebut. Dalam hal ini, belum ada jaminan bahwa

sekolah dengan tingkat kelulusan yang tinggi adalah sekolah yang jujur dalam melaksanakan UN.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pengawasan lembaga pendidikan merupakan suatu kegiatan lanjutan yang wajib guna memastikan akan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan tercapai dan mengantisipasi adanya penyimpangan yang tentunya akan mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Sementara itu, kontrol lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai pengendalian secara efektif yang dilakukan oleh pemerintah, pengawas dan dewan sekolah.

- b. JAKARTA - Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengantongi 431 temuan penyimpangan dalam pelaksanaan UN berbasis komputer maupun kertas. Dari angka tersebut, 42,6% adalah temuan pada UN berbasis komputer dan 57,4% merupakan pelanggaran pada UN berbasis kertas.

"Seharusnya temuan ini bisa dihindarkan mengingat temuan serupa pernah terjadi pada penyelenggaraan UN sebelumnya," ujar Komisioner Ombudsman bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso di kantor ORI, Kamis (21/5/2015).

- c. IPDN sempat ramai dibicarakan publik karena kasus kekerasan yang membuat calon mahasiswanya meninggal. Dari tahun 1993-2007 diperkirakan ada 35 orang yang tewas rata-rata disebabkan oleh perlakuan tidak layak dari senior kepada mahasiswa baru. Namun dari total praja yang tewas, hanya 10 kasus saja yang terungkap di media massa.
- d. Jaksa penuntut umum (JPU) Kecabjari Lapri, Alfian Kiay mengatakan tersangka yang merupakan kepala sekolah SMP Negeri 1 Lappariaja tersebut diduga telah menyalahgunakan dana BOS dan dana gratis tahun anggaran 2014 lalu. "Akibat dugaan perbuatan tersebut kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp108 Juta, tersangka menjalani masa tahanan mulai hari ini di Lapas Watampone," kata Alfian.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Budaya kontrol dalam pendidikan di sekolah harus memberikan dampak yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas isu-isu penyelenggaraan sistem pembelajaran di sekolah. Dalam pendidikan di sekolah kontrol dipakai dalam dua arti. Pertama kontrol meliputi kegiatan mengarahkan dan membimbing maupun mempertimbangkan, dan menilai. Perhatiannya berpusat pada pelaksanaan dan hasil hasil pembelajaran. Kegiatan kontrol / pengawasan semacam ini dipikirkan terutama sebagai proses penerapan kekuasaan melalui alat dan teknik pengawasan untuk menetapkan apakah rencana, kebijakan, instruksi, dan prosedur yang ditetapkan diikuti. Kedua, pengawasan yang menyediakan kondisi yang perlu untuk menyelesaikan tugas kewajiban dengan efektif dan efisien. Pengawasan dalam pengertian ini hendak menjamin keselarasan, kecerdasan, dan ekonomi pada semua upaya pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- David T. Conley, David T. 2003. *Who Governs Our School? Changing Role and Responsibilities*. New York: Teacher College Press.
- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Gusmawan, Try. 2015. *Makalah Politik Pendidikan*. Diakses online di <http://tugaskuliah15.blogspot.co.id/2015/10/makalah-politik-pendidikan.html>
- Hasrat, Waris. Diduga Tilep dana bos, kepek ini ditahap jaksa. Sindonews.com. Diakses online pada <http://daerah.sindonews.com/read/1126660/192/diduga-tilep-dana-bos-kepek-ini->

[ditahan-jaksa-1469611974](#)

Newdetik.com. Diakses online pada <http://news.detik.com/berita/3013162/catatan-kelam-ipdn-dari-kasus-kekerasan-hingga-narkoba>.

Oemar Hamalik. 2008. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Pengawasan dan Penilaian Pendidikan. UPI: Bandung. Diakses online di file.upi.edu/...PENDIDIKAN/...Pendidikan.../PENGAWASAN_D pada tanggal 31 Januari 2017

Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 15 ayat 4.

Salmah Muslimah. Catatan Kelam IPDN, dari Kasus Kekerasan Hingga Narkoba.

Schein. E. H. (1996). *The Role of the Founder in Creating Organizational Culture*. San Francisco: Jossey Bass.

Sodik, Kuntoro A. 2007. *Menapak jejak pendidikan nasional Indonesia dalam Kearifan sang profesor*. Yogyakarta: UNY Press.

Stolp., Stephen. "Leadership for School Culture". *ERIC Digest*, Number 91. Tahun 1994, (http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed370198.html).

Tilaar. H. A. R & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Tahun 1950 tentang Pendidikan.

UUD 1945 BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan.